

STUDI PUSTAKA NARASI *PINKWASHING* PADA UNGGAHAN-UNGGAHAN AKUN @ISRAEL DI PLATFORM X

Katherine Yovita

Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya

Email: katherine.22084@mhs.unesa.ac.id

Tsuroyya

Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya

Email: tsuroyya@unesa.ac.id

Abstrak

Praktik pendudukan dan okupasi Israel di Palestina masih menjadi perhatian masyarakat internasional dan memicu berbagai aksi solidaritas global. Di tengah eskalasi konflik tersebut, media sosial berkembang menjadi ruang kontestasi berbagai kepentingan politik, termasuk melalui strategi propaganda digital. Salah satu strategi yang digunakan Israel adalah *pinkwashing*, yaitu pemanfaatan isu keberagaman identitas gender dan orientasi seksual untuk membangun citra sebagai negara yang modern, demokratis, dan ramah terhadap komunitas LGBTQ+, sekaligus merepresentasikan Palestina sebagai masyarakat yang intoleran dan homofobik. Narasi tersebut dinilai mengeksploitasi hak-hak kelompok LGBTQ+ untuk memperoleh legitimasi moral serta mengalihkan perhatian masyarakat internasional dari praktik pendudukan, pelanggaran hak asasi manusia, dan krisis kemanusiaan di Palestina. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka melalui kajian terhadap literatur mengenai propaganda, *pinkwashing*, *Brand Israel*, homonasionalisme Jasbir Puar, serta berbagai penelitian yang membahas strategi komunikasi politik Israel di media digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa narasi *pinkwashing* merupakan bagian dari strategi komunikasi politik yang mengonstruksikan Israel sebagai negara progresif dan inklusif, sementara Palestina diposisikan sebagai masyarakat yang terbelakang, intoleran, dan anti-LGBTQ+. Strategi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencitraan, tetapi juga sebagai propaganda digital untuk membentuk opini publik global dan memperoleh legitimasi politik di tengah konflik yang sedang berlangsung.

Kata kunci: *pinkwashing*, propaganda, platform X, LGBTQ+, Israel-Palestina

Abstract

Israel's practices of occupation in Palestine continue to draw the attention of the international community and spark various acts of global solidarity. Amid the escalation of this conflict, social media has evolved into a space where various political interests compete, including through digital propaganda strategies. One strategy employed by Israel is "pinkwashing"—the exploitation of issues surrounding gender identity and sexual orientation to project an image of itself as a modern, democratic, and LGBTQ+-friendly nation, while simultaneously portraying Palestine as an intolerant and homophobic society. This narrative is seen as exploiting the rights of the LGBTQ+ community to gain moral legitimacy and divert the international community's attention from the occupation, human rights violations, and the humanitarian crisis in Palestine. This study employs a qualitative approach using a literature review method, examining works on propaganda, pinkwashing, "Brand Israel," Jasbir Puar's concept of homonationalism, and various studies discussing Israel's political communication strategies in digital media. The results of the study indicate that the pinkwashing narrative is part of a political communication strategy that constructs Israel as a progressive and inclusive nation, while positioning Palestine as a backward, intolerant, and anti-LGBTQ+ society. This strategy serves not only as a public relations effort but also as digital propaganda to shape global public opinion and secure political legitimacy amid the ongoing conflict.

Keywords: *pinkwashing*, propaganda, X platform, LGBTQ+, Israel Palestine

PENDAHULUAN

Konflik Palestina–Israel yang berlangsung hingga saat ini terus menjadi perhatian masyarakat internasional dan memicu berbagai aksi solidaritas global. Berdasarkan data Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), sejak tahun 2023 telah berlangsung lebih dari 51.000 demonstrasi pro-Palestina di 104 negara dan wilayah. Di tengah arus informasi yang semakin masif, media tidak hanya berfungsi sebagai untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi ruang kontestasi berbagai kepentingan politik. Dalam masyarakat kapitalis, media massa, representasi simbolis, dan konstruksi naratif menjadi bagian dari bagaimana kekuasaan dijalankan dan dipertahankan (Rico, 2024). Salah satu strategi komunikasi politik yang digunakan Israel untuk mempertahankan dukungan internasional adalah propaganda melalui program *Hasbara*, yaitu upaya membentuk opini publik melalui distorsi informasi dan rekayasa media.

Hasbara bukan sebuah rencana yang muncul secara tiba-tiba atau sporadis, melainkan sebuah kebijakan resmi yang dirancang dengan serius untuk menjangkau audiens internasional. Hal ini tercermin melalui alokasi anggaran Hasbara yang terus meningkat. Dilansir dari Tempo.co, pada tahun 2025, Knesset Israel menyetujui alokasi tambahan dana sebesar US\$150.000.000 untuk anggaran propaganda Hasbara. Praktik-praktik ini, tidak hanya menunjukkan seberapa jauh usaha Israel untuk membentuk opini publik melalui Hasbara, melainkan juga menyusun wacana yang menguntungkan Israel.

Perkembangan teknologi komunikasi mendorong propaganda bertransformasi ke ruang digital sehingga distribusi pesan menjadi lebih cepat, luas, dan terarah kepada audiens global. Salah satu bentuk propaganda yang berkembang dalam konflik Palestina–Israel adalah *pinkwashing*, yaitu strategi komunikasi yang memanfaatkan isu keberagaman identitas gender dan orientasi seksual untuk membangun citra Israel sebagai negara modern, demokratis, dan ramah terhadap komunitas LGBTQ+, sekaligus merepresentasikan Palestina sebagai masyarakat yang konservatif, intoleran, dan

anti-LGBTQ+. Strategi tersebut diwujudkan melalui berbagai agenda internasional dalam kampanye *Brand Israel* dan kini semakin masif dijalankan melalui media sosial. Narasi tersebut menuai kritik karena dinilai mengeksploitasi hak-hak komunitas LGBTQ+ untuk mengalihkan perhatian publik dari krisis kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional di Palestina.

Kondisi komunitas LGBTQ+ di Palestina juga tidak terlepas dari perbedaan sistem pemerintahan di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Tepi Barat yang berada di bawah *Palestine Authority* (PA) tidak secara eksplisit mengkriminalisasi hubungan sesama jenis, sedangkan Jalur Gaza yang berada di bawah Hamas sejak tahun 2007 menerapkan hukum yang lebih konservatif. Meskipun demikian, perlindungan hukum terhadap orientasi seksual dan identitas gender di kedua wilayah tersebut masih sangat terbatas.

Kondisi tersebut berbeda dengan situasi di Israel. Meskipun implementasi kebijakan perlindungan terhadap komunitas LGBTQ+ masih sering menuai kritik dari masyarakat Israel sendiri, keberagaman identitas gender dan orientasi seksual memperoleh ruang yang jauh lebih luas. Berbagai festival film, pameran seni, hingga parade *Pride* diselenggarakan secara terbuka dengan dukungan yang serius. Selain itu, kelompok Queer juga diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam bidang legislatif maupun militer. Berbagai upaya tersebut memperkuat citra Israel sebagai satu-satunya negara di Timur Tengah yang aman dan ramah terhadap komunitas LGBTQ+.

Di balik citra progresif tersebut, berbagai pihak menilai bahwa kebijakan Israel terhadap komunitas LGBTQ+ merupakan bentuk kebebasan bersyarat yang digunakan sebagai strategi politik. Oleh karena itu, banyak organisasi Zionis menyebarkan narasi bahwa Israel menyambut dengan tangan terbuka orang-orang LGBTQIA+ yang melarikan diri dari penganiayaan terhadap populasi Palestina yang dianggap terbelakang dan ketinggalan zaman (Chassereau, 2022). Narasi tersebut dipandang sebagai bagian dari strategi *pinkwashing* yang memanfaatkan isu keberagaman seksual untuk membangun legitimasi moral di mata masyarakat internasional. Namun, Cullity dkk. (2021)

dalam *Muslim Public Affairs Council* (MPAC) menunjukkan bahwa diskriminasi di Israel tidak hanya berkaitan dengan identitas seksual, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan apartheid dan rasisme struktural yang membatasi hak-hak warga Palestina, baik heteroseksual maupun Queer.

Menanggapi konstruksi wacana tersebut, kesadaran kolektif komunitas Queer global terus meningkat. Banyak aktivis berpendapat bahwa perjuangan hak-hak LGBTQ+ tidak dapat dipisahkan dari perjuangan pembebasan rakyat Palestina. Berdasarkan informasi dari BDS Movement, berbagai komunitas LGBTQ+ internasional telah mengintegrasikan isu Palestina ke dalam agenda *Pride*, mendukung seruan boikot Eurovision 2019 di Tel Aviv, serta menarik partisipasi dari festival film TLVFest yang berafiliasi dengan pemerintah Israel. Fenomena tersebut menunjukkan munculnya gerakan *anti-pinkwashing* yang semakin luas di tingkat internasional.

Di Indonesia, kelompok LGBTQ+ masih menghadapi berbagai tantangan sosial, budaya, agama, bahkan hukum. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai moral dan keyakinan, agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap keberagaman identitas gender dan orientasi seksual. Hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada tahun 2017 menunjukkan bahwa 87,6% masyarakat merasa terancam dengan kehadiran kelompok LGBTQ+. Survei lain juga menunjukkan bahwa lebih dari 80% masyarakat Indonesia meyakini perilaku seksual gay dan lesbian bertentangan dengan ajaran agama. Berdasarkan data Equaldex tahun 2019, sekitar 80% masyarakat Indonesia menolak homoseksualitas sehingga Indonesia berada pada peringkat ke-32 dari 34 negara berdasarkan tingkat penerimaan terhadap homoseksualitas secara global.

Meskipun demikian, komunitas LGBTQ+ Indonesia tetap menunjukkan kepedulian terhadap konflik Palestina-Israel. Narasi *pinkwashing* yang berkembang di media sosial harus berhadapan dengan konteks sosial Indonesia yang masih menunjukkan berbagai bentuk intoleransi terhadap keberagaman identitas gender dan seksual. Di sisi lain, komunitas LGBTQ+ Indonesia terus

menyuarakan solidaritas terhadap Palestina melalui berbagai diskusi publik., hingga gerakan advokasi akar rumput. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun kelompok LGBTQ+ menghadapi berbagai bentuk penolakan di Indonesia, mereka tetap memiliki kepekaan terhadap isu kemanusiaan dan politik global.

Perkembangan media sosial juga menjadikan propaganda *pinkwashing* semakin mudah menjangkau audiens global. Salah satu platform yang aktif digunakan pemerintah Israel adalah platform X melalui akun resmi @Israel. Berbagai unggahan pada akun tersebut memanfaatkan isu keberagaman identitas gender dan orientasi seksual untuk membangun citra Israel sebagai negara yang progresif sekaligus menampilkan Palestina sebagai pihak yang anti-LGBTQ+. Bagi audiens yang termasuk dalam kelompok termarginal seperti komunitas LGBTQ+, polemik yang terjadi antara Palestina dan Israel menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam menunjukkan keberpihakan maupun pernyataan sikap.

Diskursus media yang berkembang kerap membingkai isu ini tidak hanya pada persoalan politik melainkan juga aspek keagamaan dan keragaman seksualitas yang terdapat di kedua negara. Sementara itu, di saat yang bersamaan, kelompok LGBTQ+ yang rentan menghadapi persekusi dan diskriminasi di berbagai negara, kehadirannya cenderung lebih dahulu resistan terhadap norma dan agama dominan yang berkembang di masyarakat.

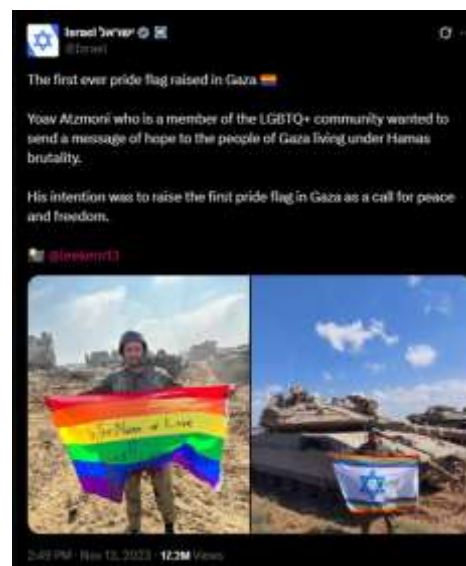
Dalam hal ini, situasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun narasi tertentu melalui unggahan di platform media sosial. Beberapa konten yang diunggah oleh Israel, terlihat menyoroti perbedaan realita pengalaman hidup yang harus dihadapi sebagai individu LGBTQ+ di Palestina dan di Israel. Namun demikian, Isu politik, agama, dan keragaman seksual yang digambarkan secara berdampingan, membuat situasi menjadi lebih kompleks karena para informan harus menavigasi berbagai kepentingan dalam satu wacana yang saling tumpang tindih.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis konstruksi narasi *pinkwashing* yang disampaikan melalui

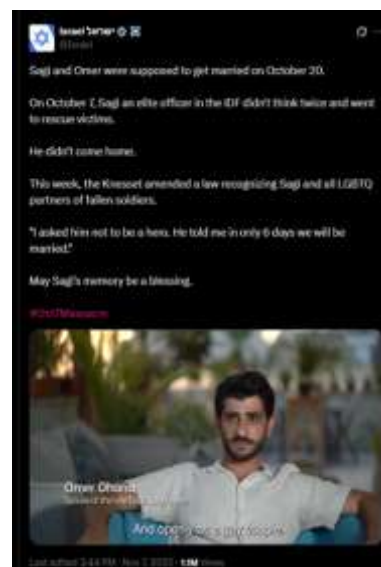
unggahan akun resmi @Israel di platform X sebagai bagian dari strategi komunikasi politik Israel di ruang digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk mengkaji berbagai literatur mengenai propaganda, *pinkwashing*, Brand Israel, dan homonasionalisme, kemudian menghubungkannya dengan narasi yang ditampilkan dalam unggahan akun resmi @Israel. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana isu keberagaman identitas gender dan orientasi seksual dikonstruksikan untuk membangun citra Israel sebagai negara yang progresif sekaligus merepresentasikan Palestina sebagai masyarakat yang intoleran dan homofobik, sebagai bagian dari strategi *pinkwashing* untuk memperoleh legitimasi moral serta mengalihkan perhatian masyarakat internasional dari praktik pendudukan, pelanggaran hak asasi manusia, dan krisis kemanusiaan di Palestina.

METODE PENELITIAN

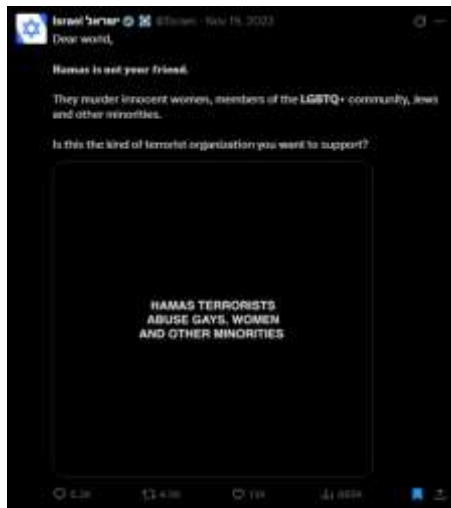
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Metode ini dilakukan melalui penelaahan, pengumpulan, dan analisis berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, serta dokumen lain yang membahas propaganda, *pinkwashing*, Brand Israel, homonasionalisme, dan representasi komunitas LGBTQ+ dalam konteks konflik Palestina-Israel. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan empat unggahan akun resmi @Israel di platform X yang mengandung narasi *pinkwashing* sebagai objek kajian. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan temuan pada unggahan tersebut dengan kajian literatur yang relevan untuk menjelaskan bagaimana narasi *pinkwashing* dikonstruksikan sebagai strategi komunikasi politik Israel.



Pada konten pertama menampilkan seorang tentara Israel yang mengibarkan bendera Pride di atas reruntuhan rumah sipil Palestina disertai tulisan "*In the Name of Love*".



Konten kedua menunjukkan video wawancara Omer Ohana mengenai Sagi, seorang tentara LGBTQ+ Israel yang gugur pada peristiwa 7 Oktober 2023.



“*Hamas is not your friend*” sebuah pernyataan yang diungkapkan oleh Israel dalam menarasikan Hamas sebagai ancaman bagi komunitas LGBTQ+, perempuan, dan kelompok minoritas.



Konten menampilkan cuplikan pernyataan Hassan Nasrallah mengenai homoseksualitas dengan caption “*A special message from Hezbollah leader, Hassan Nasrallah to Queers for Palestine*”. Keempat unggahan tersebut terlebih dahulu dianalisis pada tahap *encoding* untuk mengidentifikasi pesan dominan yang dikonstruksikan, kemudian digunakan sebagai stimulus pada tahap *decoding* untuk mengetahui bagaimana kelompok LGBTQ+ memaknai dan merespons narasi *pinkwashing* yang dibangun melalui unggahan tersebut.

Selanjutnya, keabsahan data diuji menggunakan teknik peningkatan ketekunan

yang dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian dengan teori, penelitian terdahulu, serta berbagai sumber literatur yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) *Pinkwashing* sebagai Strategi Propaganda Politik di Media Sosial

Media massa merupakan instrumen yang esensial dalam mendistribusikan informasi sekaligus membentuk opini publik dan konstruksi realitas sosial. Kekuatan tersebut menjadikan media dapat dimanfaatkan sebagai sarana propaganda, yaitu teknik yang digunakan untuk memengaruhi tindakan manusia dengan memanipulasi representasi yang disajikan melalui lisan, tulisan, gambar, maupun bentuk komunikasi sosial lainnya (Lasswell, 1937). Dengan demikian, media massa dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengkonstruksi realitas dan memanipulasi khalayak dalam mewujudkan aksi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.

James E. Combs dan Dan Nimmo (1994) menjelaskan bahwa propaganda merupakan usaha yang dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk memengaruhi opini, tingkah laku, serta membujuk atau memanipulasi individu agar mempercayai atau melakukan sesuatu sesuai tujuan propagandis. Dalam perkembangannya, transformasi teknologi komunikasi turut mengubah praktik propaganda ke ruang digital sehingga distribusi pesan menjadi lebih luas, cepat, dan terarah.

Dalam konteks politik, Jacques Ellul (1965) menjelaskan bahwa propaganda politik merupakan strategi propaganda yang sistematis dan terorganisir yang digunakan oleh negara, partai politik, atau aktor kekuasaan melalui media massa untuk memperoleh dukungan, membenarkan kebijakan, maupun memobilisasi massa. Ellul membedakan propaganda politik menjadi propaganda statis yang membangun ideologi jangka panjang dan propaganda taktis yang bertujuan memperoleh hasil langsung, seperti propaganda perang yang mendorong penyerahan musuh.

Salah satu bentuk propaganda politik yang berkembang dalam konflik Palestina-Israel adalah *pinkwashing*, yaitu pemanfaatan isu hak-hak LGBTQ+ untuk membangun citra

positif negara sekaligus mengalihkan perhatian dari pelanggaran hak asasi manusia di Palestina. Istilah ini berawal dari kritik terhadap perusahaan yang menggunakan simbol pita merah muda sebagai bentuk kepedulian terhadap kanker payudara, tetapi tetap memasarkan produk yang berpotensi meningkatkan risiko penyakit tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Breast Cancer Action (2019), "*pinkwashing* bukan sekadar promosi pita merah muda, tetapi secara khusus merujuk pada hipokrisi perusahaan yang mengklaim peduli terhadap kanker payudara, sementara produk atau layanan mereka justru dapat meningkatkan risiko penyakit tersebut."

Seiring perkembangannya, istilah *pinkwashing* dikontekstualisasikan pada strategi propaganda Israel. The International LGBTQI Youth and Student Organisation menjelaskan bahwa *pinkwashing* digunakan sebagai instrumen propaganda yang menggunakan hak-hak kelompok LGBTQ+ untuk menutupi kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Schulman (2011) menyebutkan bahwa *Pinkwashing* adalah istilah yang dikontekstualisasikan pada tahun 2010 oleh QUIT (Queers Undermining Israeli Terrorism) untuk menggambarkan strategi mempromosikan citra inklusivitas LGBTQI sebagai cara untuk mengalihkan perhatian dari pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, isu keberagaman seksual tidak lagi diposisikan semata sebagai persoalan hak asasi manusia, tetapi juga sebagai bagian dari strategi komunikasi politik dalam membangun legitimasi negara di ruang digital.

2) Brand Israel dan Homonasionalisme sebagai Kerangka *Pinkwashing*

Pinkwashing yang dilakukan Israel tidak dapat dilepaskan dari proyek rebranding negara melalui kampanye Brand Israel. Berawal dari sebuah kampanye rebranding negara besar-besaran, pada tahun 2005 sejumlah kementerian Israel berkolaborasi dengan eksekutif pemasaran dari Amerika Serikat untuk meluncurkan proyek Brand Israel. Sarah Schulman (2011) mengungkapkan bahwa riset demografi menunjukkan pria berusia 18–34 tahun memandang Israel tidak relevan dengan kehidupan mereka. Oleh karena itu, Israel berupaya membangun ulang citranya yang sebelumnya cenderung militeristik dan religius

menjadi lebih modern dan progresif. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kampanye, seperti keterlibatan dalam Gay Games pada tahun 2009 dan kampanye Tel Aviv Gay Vibe pada tahun 2010. Jejak tersebut menunjukkan bahwa aksi propaganda *pinkwashing* Israel merupakan usaha yang terstruktur, sistematis, dan telah berlangsung lama.

Menurut Ellison (2013), kampanye Brand Israel memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mempromosikan Israel sebagai destinasi wisata yang ramah terhadap komunitas LGBTQ+ melalui konsep *gay tourism*, iklan pariwisata, media perjalanan, dan program wisata yang menyasar komunitas Queer. Kedua, mengistimewakan rekam jejak inklusivitas LGBTQ+ sebagai pencapaian yang progresif dengan menonjolkan isu pernikahan sesama jenis dan keterlibatan kelompok LGBTQ+ dalam militer, sementara keterbatasan hak transgender, larangan pernikahan sesama jenis di dalam negeri, serta diskriminasi terhadap Palestina tidak dimasukkan ke dalam narasi kampanye. Ketiga, membandingkan Israel dengan Palestina dan negara-negara Arab lainnya untuk menegaskan citra Israel sebagai negara yang lebih modern, aman, demokratis, dan ramah terhadap komunitas LGBTQ+, sementara masyarakat Arab dan Muslim digambarkan sebagai tertinggal, represif, dan homofobik.

Strategi tersebut selaras dengan konsep homonasionalisme yang dikembangkan Jasbir Puar dalam *Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times* (2007). Puar menjelaskan bahwa pemanfaatan narasi hak-hak LGBTQ+ oleh negara bukan sekadar strategi komersial untuk membentuk ulang citra, melainkan bagian dari konstruksi ideologis yang menempatkan toleransi terhadap keberagaman seksual sebagai simbol kemajuan dan superioritas moral suatu bangsa.

Puar membagi homonasionalisme ke dalam tiga manifestasi. Pertama, *Sexual Exceptionalism*, yaitu situasi ketika negara mengakui dan merangkul sebagian identitas LGBTQ+ tertentu untuk mendukung proyek nasionalisme sekaligus membedakan diri dari kelompok lain, khususnya negara Arab dan Muslim. Kedua, *Queer as Regulatory*, yaitu ketika identitas Queer tidak lagi selalu bersifat

subversif, tetapi menjadi alat regulasi dalam kerangka biopolitik. Dalam kondisi ini, sebagian subjek Queer dirangkul dan dinormalisasi sebagai bagian dari kehidupan nasional yang "layak", sementara kelompok Queer lainnya tetap diposisikan sebagai menyimpang dan dapat disingkirkan. Ketiga, *Ascendancy to Whiteness*, yaitu kondisi ketika penerimaan terhadap identitas Queer bergantung pada kesesuaiannya dengan nilai-nilai dominan seperti modernitas dan liberalisme, sehingga individu yang tidak selaras dengan nilai tersebut tetap dimarginalkan.

Melalui pemanfaatan narasi mengenai "keterbelakangan seksual" di Palestina, *pinkwashing* meniadakan dampak pendudukan kolonial terhadap pembentukan dan pembatasan norma budaya Palestina, sekaligus mendelegitimasi perjuangan organisasi Queer Palestina seperti Palestinian Queers for Boycott, Divestment, and Sanctions (PQ BDS) (Puar, 2011). Dengan demikian, *pinkwashing* tidak hanya menjadi strategi pencitraan negara, tetapi juga mekanisme politik yang digunakan untuk menarik dukungan komunitas Queer global ke dalam proyek nasionalisme dan kekuasaan negara Israel.

3. Lanskap LGBTQ+ di Indonesia sebagai Konteks Resepsi Audiens

Pemaknaan komunitas LGBTQ+ terhadap narasi *pinkwashing* tidak dapat dilepaskan dari pengalaman mereka sebagai kelompok minoritas di Indonesia. Data Kementerian Kesehatan RI menunjukkan bahwa diperkirakan sekitar 3% populasi Indonesia merupakan bagian dari kelompok LGBTQ+, sehingga keberadaan kelompok ini merupakan realitas sosial yang nyata. Meskipun demikian, komunitas LGBTQ+ di Indonesia masih terus memperjuangkan ruang aman untuk hidup bebas dari diskriminasi.

Perkembangan komunitas LGBTQ+ di Indonesia telah berlangsung sejak akhir 1960-an melalui berbagai organisasi, seperti Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD), Lambda Indonesia, GAYa Nusantara, dan Yayasan Srikandi Sejati. Kehadiran organisasi-organisasi tersebut menjadi ruang yang lebih inklusif bagi komunitas LGBTQ+ untuk saling mendukung sekaligus memperjuangkan hak-haknya. Di sisi lain, kelompok LGBTQ+ juga

kerap menghadapi marginalisasi dan kriminalisasi, terutama dalam ranah sosial dan politik. Rachma (2021) menyebutkan bahwa wacana mengenai hak-hak LGBT cenderung tidak pernah dibicarakan dalam ranah politik di Indonesia dan dipandang tidak lebih dari sekadar "ketidaknormalan" yang ditandai dengan perilaku yang dianggap tidak wajar.

Kerentanan tersebut tercermin dalam berbagai bentuk diskriminasi, mulai dari ujaran kebencian, pembubaran kegiatan komunitas, ancaman kekerasan, hingga kebijakan yang membatasi hak-hak kelompok LGBTQ+. Salah satu contohnya adalah aksi penolakan terhadap kegiatan LGBTQ+ di Yogyakarta pada tahun 2016 yang disertai ajakan melakukan *sweeping* terhadap peserta kegiatan. Human Rights Watch dalam laporan *Permainan Politik Ini Menghancurkan Hidup Kami* juga mendokumentasikan berbagai bentuk homofobia dan diskriminasi yang menunjukkan belum optimalnya perlindungan negara terhadap kelompok LGBTQ+.

Selain itu, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) mencatat berbagai praktik diskriminasi sepanjang tahun 2023, seperti kampanye anti-LGBT, pelarangan aktivitas komunitas Queer, pemerasan terhadap transpuan oleh aparat, hingga pembatasan akses terhadap layanan publik. Kemunculan komunitas G-Hunter yang secara terbuka menyatakan tujuan memburu kelompok gay semakin memperlihatkan posisi LGBTQ+ sebagai kelompok minoritas yang rentan terhadap persekusi.

Tekanan terhadap kelompok LGBTQ+ juga termanifestasi dalam bentuk kebijakan diskriminatif. Salah satunya adalah penerapan Qanun Jinayat di Aceh yang mengkriminalisasi hubungan seksual sesama jenis melalui ancaman hukuman cambuk, denda, maupun pidana penjara. Berbagai bentuk tekanan sosial, kekerasan simbolik maupun fisik, ancaman, dan kebijakan yang tidak berpihak tersebut membentuk pengalaman hidup komunitas LGBTQ+ dalam situasi yang dipenuhi rasa tidak aman, pembatasan ekspresi, serta kerentanan terhadap diskriminasi dan persekusi.

Dengan demikian, pengalaman sebagai kelompok minoritas di Indonesia menjadi konteks penting dalam memahami bagaimana

informan memaknai narasi *pinkwashing*. Pengalaman menghadapi diskriminasi membuat mereka memahami pentingnya perlindungan terhadap hak-hak LGBTQ+, namun pada saat yang sama tidak serta-merta menerima penggunaan isu tersebut sebagai legitimasi atas praktik pendudukan dan pelanggaran hak asasi manusia di Palestina.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa narasi *pinkwashing* yang dikonstruksikan melalui unggahan akun resmi @Israel di platform X merupakan bagian dari strategi komunikasi politik untuk membangun citra Israel sebagai negara yang progresif, demokratis, dan ramah terhadap komunitas LGBTQ+, sekaligus merepresentasikan Palestina sebagai masyarakat yang intoleran, terbelakang, dan homofobik. Melalui konstruksi tersebut, isu keberagaman identitas gender dan orientasi seksual digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh legitimasi moral di mata masyarakat internasional serta mengalihkan perhatian dari praktik pendudukan, pelanggaran hak asasi manusia, dan krisis kemanusiaan yang berlangsung di Palestina.

Kajian literatur juga menunjukkan bahwa strategi tersebut tidak dapat dilepaskan dari kampanye Brand Israel dan konsep homonasionalisme Jasbir Puar yang menjelaskan bagaimana pengakuan terhadap hak-hak kelompok LGBTQ+ dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari proyek nasionalisme, sekaligus membangun dikotomi antara Israel sebagai negara modern dan liberal dengan Palestina sebagai masyarakat yang dianggap tertinggal. Dalam konteks tersebut, *pinkwashing* tidak hanya berfungsi sebagai strategi pencitraan, tetapi juga sebagai propaganda digital yang memanfaatkan media sosial untuk membentuk opini publik global melalui konstruksi narasi yang selektif.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa narasi mengenai keberagaman identitas gender dan orientasi seksual dalam konflik Palestina–Israel tidak dapat dipahami semata sebagai isu perlindungan hak-hak kelompok LGBTQ+, melainkan perlu ditempatkan dalam konteks relasi kuasa, komunikasi politik, dan propaganda digital yang lebih luas. Oleh

karena itu, pembahasan mengenai isu LGBTQ+ dalam konflik Palestina–Israel perlu dipahami secara kritis melalui perspektif interseksionalitas agar tidak menyederhanakan kompleksitas pengalaman kelompok marginal maupun mengabaikan konteks pendudukan dan krisis kemanusiaan yang melatarbelakanginya.

DAFTAR PUSTAKA

- Breastcancer.org. (2024, December 7). What Is Breast Cancer *Pinkwashing*? <https://www.breastcancer.org/about-breast-cancer/breast-cancer-awareness-month/pinkwashing>
- Carboni, A., & Murillo, C. (2025, December 11). Whats Driving Conflict Today? A Review of Global Trends. ACLED. <https://acleddata.com/report/whats-driving-conflict-today-review-global-trends>
- Chassereau, J. (2022, October 30). Israel: a two-speed LGBTQIA+ progressivism. <https://igg-geo.org/en/2022/10/30/israel-a-two-speed-lgbtqia-progressivism/>
- Combs, James E.; Nimmo, Dan. (1994) *Propaganda Baru, Kediktatoran Perundingan dalam Politik Masa Kini*, Penerjemah: Lien Amalia, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Cullity, L., Jarmankani, H., Koc, E., Rahman, E., & MPAC Policy Interns. (2021, August 13). *Pinkwashing*-Weaponization of LGBTQ Rights. Muslim Public Affairs Council. <https://archive.mpac.org/article/pinkwashing-weaponization-of-lgbtq-rights/>
- Ellison, J. (2013). Recycled rhetoric: brand Israel “*pinkwashing*” in historical context. <https://via.library.depaul.edu/etd>
- Ellul, J. (1965). *Propaganda: The formation of men's attitudes* (K. Kellen & J. Lerner, Trans.). (Original work published 1962)
- Equaldex. (n,d). LGBTQ Rights in Indonesia. <https://www.equaldex.com/region/indonesia>
- Hall, S. W. (1980). Encoding/Decoding. In S. Hall, D. Hobson, A. Lowe, & P. Willis

(Eds.), Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies (pp. 63-87).

Jasbir K. Puar. (2007). *Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times*. Duke University Press.

Knight, K. (2016). "Permainan Politik ini Menghancurkan Hidup Kami" Komunitas LGBT Indonesia Dalam Ancaman. Human Right Watch.

Rachma, F. M. (2021). Wacana Tekstual dan Sosial Isu LGBT Pada Pernyataan Partai Gerindra (Analisis Wacana Kritis Model Roger Fowler pada Tweet Partai Gerindra)

Schulman, S. (2011, December 6). A Documentary Guide to *Pinkwashing*. HuffPost Voices. https://www.huffpost.com/entry/israel-pinkwashing_b_1132369.

Schulman, S. (2011, November 22). Israel and 'Pinkwashing'. Nytimes. Diakses pada tanggal 5 September 2025. <https://www.nytimes.com/2011/11/23/opinion/pinkwashing-and-israels-use-of-gays-as-a-messaging-tool.html>.